

EVALUASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK TERHADAP PEMILIHAN WALIKOTA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

¹ Aldi Muhammad P. Hasibuan ² Dr. Drs. Gasper Liauw, M.Si. ³Dr. Rosmery Elsy, SH, M.Si.

NPP. 31.0045 ¹

¹ Asdaf Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: ¹ aldihasibuan18@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The year 2020 is indeed an important moment for leadership regeneration in Medan City with the Pilkada. Although the Medan City Regional General Election Commission has implemented a political education program, the voter turnout rate only reached 45.97%, far below the Central KPU's target of 77.5%. Evaluation is needed to improve the effectiveness of the political education program. **Purpose:** The purpose of this study focuses on the evaluation and provision of alternative efforts of the political education program conducted by KPUD Kota Medan. **Method:** The research method used is descriptive qualitative with an inductive approach, with data collection techniques in the form of interviews, observations, and document studies. Data analysis was conducted using CIPP evaluation analysis which includes context, input, process, and product dimensions. **Result:** The results showed that the political education program was in accordance with existing regulations and the Medan City KPUD successfully implemented it despite limited resources. KPUD Kota Medan also managed to adapt to the political education program during the pandemic. Although there was an increase in voter participation compared to the previous Pilkada, the figure was still below the target of the Central KPU. In addition, no social conflicts occurred post-Election. **Conclusion:** The results of the evaluation of the political education program carried out by the Regional General Election Commission in the 2020 Pilkada in Medan City with the CIPP method approach are in accordance with applicable regulations, namely regulations related to political education PKPU Number 10 of 2018 and PKPU Number 13 of 2020. and running by adjusting political education programs during the Covid-19 pandemic, both through conventional and digital media where there was an increase in voter participation of 20.59% compared to the 2015 Pilkada, although it was still below the Central KPU target of 77.5%. **Keywords:** Political Education, CIPP Evaluation, Regional Election Commission

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Tahun 2020 memang menjadi momen penting bagi regenerasi kepemimpinan di Kota Medan dengan adanya Pilkada. Meskipun Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Medan telah melaksanakan program pendidikan politik, angka partisipasi pemilih hanya mencapai 45,97%, jauh di bawah target KPU Pusat sebesar 77,5%. Evaluasi diperlukan untuk

meningkatkan efektivitas program pendidikan politik tersebut. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini berfokus pada evaluasi dan penyediaan alternatif upaya dari program pendidikan politik yang dilakukan oleh KPUD Kota Medan. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan menggunakan analisis evaluasi CIPP yang mencakup dimensi *context*, *input*, *process*, dan *product*. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pendidikan politik sesuai dengan regulasi yang ada dan KPUD Kota Medan berhasil melaksanakannya meskipun dengan sumber daya yang terbatas. KPUD Kota Medan juga berhasil beradaptasi dengan program pendidikan politik selama pandemi. Meskipun terjadi peningkatan partisipasi pemilih dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya, angka tersebut masih di bawah target KPU Pusat. Selain itu, tidak ada konflik sosial yang terjadi pasca-Pilkada. **Kesimpulan:** Hasil evaluasi program pendidikan politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah pada Pilkada tahun 2020 di Kota Medan dengan pendekatan metode CIPP sudah sesuai peraturan yang berlaku yakni peraturan terkait pendidikan politik PKPU Nomor 10 tahun 2018 dan PKPU Nomor 13 Tahun 2020. dan berjalan dengan menyesuaikan program pendidikan politik selama pandemi Covid-19, baik melalui media konvensional maupun digital dimana terjadi peningkatan partisipasi pemilih sebesar 20,59% dibandingkan Pilkada tahun 2015, meskipun masih di bawah target KPU Pusat sebesar 77,5%.

Kata kunci: Pendidikan Politik, Evaluasi CIPP, Komisi Pemilihan Umum Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan umum, atau yang biasa disingkat sebagai pemilu, memiliki keterkaitan yang erat dengan dinamika politik dan pergantian kepemimpinan. Pemilu berfungsi sebagai mekanisme penting dalam menyuarkan kedaulatan rakyat, terwujud melalui proses yang dilakukan secara langsung, melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dijalankan secara bebas dan tanpa tekanan, menjaga kerahasiaan hak suara, serta dilakukan secara jujur dan adil berdasarkan konstitusi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pemilihan umum pasti akan dikaitkan dengan demokrasi Indonesia, salah satu cara untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum adalah partisipasi politik masyarakat, yang ditunjukkan dengan hak suara yang dimiliki oleh anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilihan umum. Perubahan pola demokrasi terjadi mulai dari demokrasi terpimpin, parlementer sampai pada era reformasi (Rahman, 2021). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Powell bahwa sebuah negara dengan sistem politik demokratis dihasilkan dari keberadaan pemilu yang kompetitif melebihi fungsi lainnya (Powell, 2000). Sistem politik Indonesia berjalan dengan seorang Presiden Indonesia yang berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan hal tersebut merupakan sebuah negara republik demokrasi perwakilan.

Perkembangan demokrasi di Indonesia sejalan dengan gejolak politik yang terjadi setelah kemerdekaan. Pola demokrasi mengalami perubahan signifikan mulai dari masa Demokrasi Terpimpin, lalu beralih ke sistem parlementer, dan akhirnya mencapai era Reformasi (Anggara, 2015). Penggunaan sistem demokrasi pada era Reformasi dianggap mampu menyatukan beragam suku, budaya, dan bahasa di Indonesia. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana warga negara melihat atas pertanggungjawaban atas tindakan pemerintah di lingkungan publik. Menurut Philippe C Schmitter dan Terry Lynn Karl dalam (Budiardjo, 1998), interaksi ini dilakukan melalui proses tidak langsung, dimana warga negara berpartisipasi melalui bekerja sama dan bersaing dengan para wakil

yang mereka pilih.

Dalam menciptakan pemilu yang demokratis dan berjalan baik, dilaksanakanlah sebuah Pendidikan politik. Dalam jurnal Nasiwan (Alfian, 1992) mengemukakan pandangannya bahwa eksistensi pendidikan politik diartikan sebagai suatu upaya yang direncanakan dengan sengaja untuk meningkatkan kesadaran warga negara tentang hak mereka untuk memilih. Pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar dapat menjadi peserta yang bertanggung jawab secara etis dan moral dalam mencapai tujuan politik (Kartono, 1996).

Hal ini meliputi pengajaran nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol politik melalui berbagai media seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik (Labolo et al., 2015). Pandangan ini menekankan bahwa eksistensi pendidikan politik adalah proses yang disengaja dan terstruktur, bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada warga negara agar mereka memiliki pemahaman yang memadai dalam konteks politik dan mampu membuat keputusan yang informan saat memberikan suara dalam pemilihan.

Selama pelaksanaan Pemilihan Walikota Medan tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dihadapkan pada dua permasalahan besar yang menggerus jalannya penyelenggaraan pemilu, yaitu kendala yang bersifat pemilu dan dampak dari pandemi Covid-19 yang meluas di seluruh masyarakat. Situasi ini tidak hanya mempengaruhi aspek-aspek pemilu, tetapi juga mengganggu upaya pendidikan politik yang dijalankan oleh KPU sebagai entitas penyelenggara. Menurut peneliti dari Pusat Penelitian Politik LIPI, Friman Noor, seperti yang dipublikasikan di laman ngertihukum.id, data dari Economy Intelligent Unit menunjukkan bahwa terdapat stagnasi dalam kualitas demokrasi, yaitu menurun dari 5.55 pada tahun 2018 menjadi 5.44 pada tahun 2020.

Pemilihan Walikota Medan tahun 2020 telah mencatat sejarah dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Medan berhasil menyelesaikan proses rekapitulasi hasil suara dengan sukses. Namun, pencapaian tersebut tidak hanya sekadar angka; terjadi juga peningkatan yang signifikan dalam tingkat partisipasi pemilih, berbeda dengan Pilkada Medan sebelumnya. Namun, dalam perjalanan Pemilihan Walikota Medan tahun 2020, tantangan-tantangan yang dihadapi sangatlah kompleks, terutama di tengah merebaknya pandemi Covid-19. Tantangan utama adalah bagaimana KPU mengatasi hambatan dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik terhadap masyarakat.

Data partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan menunjukkan pola menarik yang layak untuk diselidiki lebih lanjut. Sejak reformasi, tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Medan belum pernah mencapai angka 60%. Sebagai contoh, pada Pemilihan Walikota tahun 2005, tingkat partisipasi pemilih hanya mencapai 54,70%. Pada Pemilihan Walikota Medan tahun 2010, tingkat partisipasi pada Putaran I sebesar 35,68% dan pada Putaran II sebesar 38,28%, sedangkan pada Pemilihan Walikota 2015, tingkat partisipasi hanya mencapai 25,38%. Jumlah ini meningkat sebesar 50,39% atau dua kali lipat dibandingkan dengan Pilkada Kota Medan tahun 2015 yakni pada tahun 2020, partisipasi pemilih mencapai 45,97%, atau 736.013 suara, dari jumlah DPT sebesar 1.614.615. (sumber: KPU Kota Medan). Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat antusiasme terhadap Pilkada, secara empiris, hal ini tidak diikuti oleh tingkat partisipasi pemilih yang signifikan meningkat Pilkada yang saradan dilaksanakan pada tahun 2005 bisa mencapai 54,70%. Akibatnya, tingkat partisipasi pemilih sebagai indikator keberhasilan Pilkada belum terpenuhi.

Kondisi pandemi Covid-19 telah mengubah lanskap pelaksanaan Pemilihan Walikota Medan, membawa dampak besar pada kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik. KPU harus menghadapi kenyataan bahwa metode konvensional, seperti pertemuan fisik, kampanye tatap muka, dan pertemuan komunitas, menjadi sulit dilaksanakan. Pembatasan fisik dan langkah-langkah kesehatan yang diperlukan untuk mencegah penyebaran virus menjadi hambatan besar dalam menjalankan upaya edukasi politik kepada masyarakat. Kota Medan, sebagai salah satu peserta dalam Pemilihan Walikota serentak tahun 2020, menjalankan pendidikan politik sebagai bagian penting dari proses demokratisasi. Meskipun upaya ini telah dilakukan, pelaksanaan pendidikan politik di Kota Medan tampaknya belum mencapai hasil yang optimal dikarenakan tidak tercapainya target partisipasi nasional menurut Ketua KPU Kota Medan Agusssyah. Agusssyah menyoroti fakta bahwa pada Pilkada Medan tahun 2015, tingkat partisipasi pemilih tidak mampu melebihi angka 30%. Walaupun begitu, ia mengakui bahwa pada Pilkada tahun 2020, tingkat partisipasi pemilih mencapai angka 46%, yang menandakan kenaikan yang signifikan. Meskipun pencapaian ini merupakan lonjakan yang positif, Agusssyah juga mengakui bahwa meskipun demikian, target partisipasi pemilih tetap tidak berhasil tercapai.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan politik dalam Pilkada Kota Medan tahun 2020 tidak dapat diabaikan. Evaluasi ini diperlukan sebagai langkah kritis guna mengukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan pendidikan politik yang telah diselenggarakan dan sejauh mana pencapaian yang sesuai dengan rencana awal. Selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk menilai apakah sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai dengan baik. Proses evaluasi pendidikan politik juga memiliki peran penting dalam mengarahkan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan politik di masa yang akan datang. Jika evaluasi terhadap pendidikan politik tidak dijalankan, maka Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) sebagai penyelenggara akan kehilangan wawasan mengenai ketidaksesuaian dan potensi kelemahan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pendidikan politik. Konsekuensinya, tidak akan ada langkah-langkah perbaikan yang diambil, dan hal ini berpotensi menghambat perkembangan pelaksanaan pendidikan politik pada tahun-tahun mendatang. Tidak adanya tinjauan mendalam terhadap kebijakan dan pelaksanaan pendidikan politik sebelumnya juga berisiko mengakibatkan stagnasi dalam pengembangan demokrasi. Keputusan kebijakan untuk tahun berikutnya dapat kehilangan arahan yang berharga dari evaluasi pelaksanaan sebelumnya. Oleh karena itu, pentingnya evaluasi pendidikan politik tidak hanya memengaruhi efektivitas pelaksanaan saat ini, meskipun juga memiliki efek jangka panjang terhadap kemajuan demokrasi dan mutu pendidikan politik secara keseluruhan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Peran Organisasi BMP-Si dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat di Kabupaten Pringsewu (Imam Wahyudi, 2018) dengan tujuan penelitian penilaian terhadap pengaruh pendidikan politik yang diterapkan oleh Badan Mahasiswa Pringsewu (BPM-SI) terhadap tingkat kesadaran politik di Kabupaten Pringsewu yang menghasilkan Pendidikan politik yang diimplementasikan oleh BMP-SI berpotensi untuk meningkatkan kesadaran politik melalui dua aspek utama: Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman melalui sosialisasi, mempengaruhi peningkatan sikap dan perilaku melalui kegiatan sosialisasi mengenai kewarganegaraan. Kedua penelitian dengan judul Analisis Dampak Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula. (Adnan Pattipeilh, Nurbani Yusuf

dan Trisakti Handayani, 2018) dengan tujuan Menguraikan variasi bentuk pendidikan politik yang diadakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan bagi pemilih pemula di SMAN 1 Balauring, serta menganalisis pengaruh dari upaya pendidikan politik yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan terhadap pemilih pemula di SMAN 1 Balauring yang menghasilkan terkait metode sosialisasi pemilih pemula yang diadopsi oleh KPU di SMAN 1 Balauring melibatkan penyampaian informasi kepada setiap kelas sebagaimana dalam metode pengajaran konvensional, menggunakan alat bantu ajar berupa materi tayang mengenai kepemiluan dan sosialisasi yang dijalankan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kepada pemilih pemula bertujuan untuk mencegah golput, menandakan bahwa pendidikan politik memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih dengan membangun hubungan yang kuat. Penelitian Ketiga dengan judul Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Studi Pada Pilkada Bupati di Kabupaten Kuningan Cecep Nana Nasuha dan Cecep, 2019) dengan tujuan untuk Menganalisis dampak yang signifikan dari pendidikan politik terhadap partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bupati di Kabupaten Kuningan, dengan fokus pada pengaruh yang dimiliki oleh pendidikan politik yang diterima oleh masyarakat Kabupaten Kuningan yang menghasilkan tingkat kontribusi yang terbatas dari pengetahuan dan pemahaman masyarakat Kabupaten Kuningan yang diperoleh melalui pendidikan politik terhadap partisipasi politik selama Pilkada menunjukkan adanya kecenderungan kontribusi yang rendah dari segi tersebut. Penelitian Keempat dengan judul Pendidikan Politik Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat (Studi Di Kantor Kpu Kabupaten Tulungagung). (Laily Purnawati, 2019) penelitian ini bertujuan untuk memahami strategi sosialisasi politik yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sosialisasi politik di Kabupaten Tulungagung yang menghasilkan sosialisasi politik dalam bentuk pendidikan politik, baik melalui jalur formal maupun informal, memiliki potensi untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan faktor-faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan sosialisasi politik meliputi tingkat pendidikan, ketepatan waktu, dan efektivitas komunikasi. Penelitian Kelima dengan judul Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Melaksanakan Program Sosialisasi Pemilihan Umum Serentak di Kabupaten Karawang (Sitti Hikmawatty dan Bedjo Sujanto, 2020) yang bertujuan untuk menggambarkan kinerja KPU daerah sebagai penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan program sosialisasi pemilu serentak di Kabupaten Karawang yang menghasilkan komponen desain sosialisasi Pemilu serentak pada prinsipnya sudah sesuai dengan aturan dan komponen Pilkada Serentak di Kabupaten Karawang terkendala oleh penguasaan materi dari PPK dan PPS.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana tujuan penelitian yang akan diambil berfokus pada evaluasi pendidikan politik, namun memiliki perbedaan dengan empat penelitian terdahulu yang mengevaluasi pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum di Kota Medan, lokus penelitian yang berbeda, dimana penelitian yang akan diambil dilakukan di Kota Medan, sedangkan empat penelitian terdahulu fokus pada evaluasi pendidikan politik di lokasi yang berbeda, dan teknik analisis data yang akan digunakan adalah teknik evaluasi CIPP dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, berbeda dengan empat penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan yang berbeda dalam menganalisis data.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pendidikan politik oleh KPUD Kota Medan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemilihan walikota medan tahun 2020 dan mengevaluasi upaya yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Medan dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Medan.

II. METODE

Penelitian kualitatif mengutamakan kualitas yang disajikan secara naratif dan menemukan makna, ciri, konsep, atau fenomena (Shidiq & Choiri, 2019). Ada perlunya metode penelitian yang memudahkan penulis untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan menemukan informasi baru tentang topik penelitian. Penulis akan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan induktif dalam penelitian mereka. Metode deskriptif menggambarkan karakteristik fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat, sedangkan pendekatan induktif memulai dengan fakta-fakta spesifik menuju arah pengetahuan yang lebih umum untuk mencapai kesimpulan. Metode ini biasanya digunakan dengan pengamatan untuk mendapatkan jawaban dan sumber data yang digunakan ialah data primer atau sekunder yang relevan dapat digunakan sebagai sumber data penelitian, dalam menentukan informan penulis menggunakan kombinasi teknik pengambilan sampel purposive dan snowball untuk mendapatkan data yang sesuai dengan narasumber yang dapat diandalkan dan dapat memperluas data yang dicari dalam penelitian dimana terdapat 4 informan dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling dan 2 informan dengan teknik pengambilan sampel Snowball sampling. Pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi teknik-teknik ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan oleh penulis adalah valid dan dapat diuji. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data dari Daniel Stufflebeam yakni teknik analisis evaluasi CIPP (Context, Input, Process, dan Product). Teknik ini merupakan teknik evaluasi di mana evaluasi dilakukan sebagai suatu sistem secara keseluruhan. Tujuan penggunaan metode evaluasi ini adalah untuk menilai dan memperbaiki program yang telah dilaksanakan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pentingnya pendidikan politik sebagai aspek krusial dalam menjamin kualitas demokrasi di suatu wilayah, termasuk Kota Medan yang menjadi fokus penelitian ini. Oleh karena itu, sangatlah relevan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi pendidikan politik di Kota Medan dengan menerapkan model evaluasi yang sudah teruji, yaitu model CIPP. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Medan Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Tahun 2020

Penulis melakukan evaluasi ini dalam upaya memahami sejauh mana pendidikan politik telah diselenggarakan dengan efektif dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap proses demokratisasi di wilayah tersebut. Berikut ini ulasan hasil evaluasi yang disajikan dalam masing-masing CIPP:

➤ Evaluasi Context

Evaluasi program pendidikan politik akan dilakukan dengan menggunakan dimensi CIPP. Dimensi pertama yang akan ditinjau adalah dimensi context. Dimensi ini mencakup penilaian terhadap kebutuhan, permasalahan yang harus diatasi, dan konteks keseluruhan di mana program dijalankan. Dimensi context akan di evaluasi berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut:

a. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Program Pendidikan Politik

Berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pendidikan politik memiliki tujuan yakni bisa menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal, dan program pemilihan, meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan serta meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan. Sasaran pelaksanaan pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah, sebagaimana terdokumentasikan dalam Laporan Kelompok Kerja Sosialisasi dan partisipasi masyarakat/penyuluhan/bimbingan teknis pada penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota Kota Medan tahun 2020, ditujukan kepada beberapa komponen yakni pemilih yang berbasis, masyarakat umum, media massa, partai politik, pengawas, pemantau pemilihan dalam negeri dan pemantauan pemilihan asing, organisasi kemasyarakatan, masyarakat adat, dan instansi pemerintah. Perumusan dasar mengenai tujuan dan sasaran sangatlah penting karena keduanya menentukan arah pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPUD) dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pada pelaksanaan Pilkada 2020, KPUD Kota Medan sebagai penyelenggara Pilkada telah melaksanakan program yang sejalan dengan tujuan pendidikan politik yang telah ditetapkan sesuai dengan amanah PKPU Nomor 10 Tahun 2018. Selain itu, KPUD Kota Medan telah melakukan penyesuaian yang baik dalam menanggapi situasi pandemi COVID-19 dengan mengubah sasaran pendidikan politiknya. KPUD Kota Medan bertujuan menciptakan partisipasi aktif masyarakat dalam Pilkada dengan memfokuskan pada pemberian pendidikan politik kepada penggerak masyarakat. Penyesuaian ini memberikan beberapa keuntungan, termasuk mengubah pola pikir masyarakat agar lebih aktif dalam menggerakkan sesama masyarakat, serta mengurangi mobilitas yang masif dari masyarakat.

b. Dasar Kebijakan Penyusunan Program

Pelaksanaan pendidikan politik oleh KPUD Kota Medan didasari oleh PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak dalam Bencana Non-Alam COVID-19. Dasar hukum pelaksanaan program juga dianggap penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Dalam situasi baru akibat pandemi COVID-19, KPUD Kota Medan telah berhasil beradaptasi dengan bantuan pusat dalam mengikuti peraturan perubahan yang ada. Hal ini sangat positif karena membantu menjawab tantangan yang dihadapi akibat pandemi yang melanda masyarakat.

Kesimpulannya, dalam dimensi pertama yaitu dimensi konteks, penetapan tujuan, sasaran, dan dasar hukum pelaksanaan telah sesuai dengan PKPU Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat. Selain itu, perencanaan program pendidikan politik juga telah disesuaikan dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak dalam Bencana Non-Alam COVID-19.

➤ **Evaluasi Input**

Sementara itu, dalam dimensi kedua yaitu Dimensi Input, evaluasi ini didasarkan pada ketersediaan sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan. Evaluasi input dapat dijelaskan dengan beberapa kriteria, yaitu:

a. Sumber Daya Manusia

Peranan sumber daya manusia dalam sebuah program dianggap sangat vital. Ukuran dan mutu sumber daya manusia akan memengaruhi kesuksesan program, khususnya dalam konteks pendidikan politik pada Pilkada Kota Medan 2020. Penulis menilai bahwa dengan sumber daya yang terbatas dari KPUD Kota Medan yang menjangkau populasi sebanyak 1.614.615 individu, hal ini dianggap sangat minim. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua KPUD Kota Medan 2023, Mutia Atiqah, dalam Pilkada Kota Medan 2020 sebelumnya, jumlahnya mencapai 1.614.615 orang, terdiri dari 788.712 laki-laki dan 825.903 perempuan. Namun, pendekatan yang diambil oleh KPUD Kota Medan terhadap pendorong masyarakat merupakan respons terhadap keterbatasan sumber daya. Pembentukan agen di dalam masyarakat akan mengubah persepsi terhadap program pendidikan politik.

b. Sumber Daya Anggaran

Budgeting adalah faktor penting untuk memastikan keberhasilan program. Oleh karena itu, alokasi anggaran harus disusun berdasarkan program yang ada. Namun, dalam penelitian, akses terhadap pagu anggaran pelaksanaan program pendidikan politik tidak ditemukan. Dana yang dialokasikan untuk pendidikan politik sebagian besar digunakan untuk pembentukan dan penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) guna mengurangi antrian pemilih dan memastikan penerapan protokol kesehatan. Ini bertujuan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19. Akibatnya, alokasi anggaran untuk pendidikan politik sementara dialihkan untuk penanganan Covid-19, sehingga proses Pilkada dapat tetap berjalan.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai merupakan elemen kunci dalam kesuksesan program, termasuk program pendidikan politik. Tanpa dukungan yang memadai dalam infrastruktur, tingkat keberhasilan program bisa terpengaruh. Hal ini terkait dengan kemudahan mengatasi tantangan dalam penyelenggaraan. Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan politik oleh KPUD Kota Medan, pemenuhan sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam kesuksesan program. Dalam penelitian ini, dimensi input seperti Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran, dan Sarana Prasarana telah dimanfaatkan dengan baik oleh KPUD Kota Medan pada tahun 2020. Namun, terdapat keterbatasan dalam kapasitas input, seperti beban tambahan pada sumber daya manusia, refocusing pendidikan politik, dan kurangnya sarana prasarana yang memadai.

➤ **Evaluasi Process**

Dalam evaluasi CIPP terhadap program pendidikan politik, dimensi ketiga adalah evaluasi proses. Evaluasi ini menilai kelangsungan proses pelaksanaan pendidikan politik, fokusnya pada pemanfaatan input untuk mencapai tujuan program. Evaluasi proses dapat diukur dengan indikator-indikator berikut:

a. Sosialisasi yang Dilaksanakan

Sosialisasi pendidikan politik dilaksanakan dari 11 November 2020 terkait partisipasi politik perempuan adat pada pilkada kota medan di era pandemic 2019 Dalam kegiatan pertama, KPUD Kota Medan menyelenggarakan pendidikan politik secara langsung dengan mengunjungi masyarakat yang tersebar di 21 Kecamatan di Kota Medan, kegiatan kedua adalah acara ceremonial pengganti gebyar rakyat. Acara ini mencakup sayembara pembuatan film, mural, dan pembuatan maskot Pilkada Kota Medan. Kegiatan ini melibatkan bantuan dari media lokal dalam penyebaran informasi. KPUD Kota Medan memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang berpartisipasi dalam lomba desain maskot, dengan pengumuman pemenang dilakukan pada tanggal 23 Desember 2019 dalam rangka akan dilaksanakannya Pilkada tahun 2020, kegiatan ketiga adalah penguatan kelembagaan KPUD dengan lembaga yang ada di Kota Medan, dan kerjasama antar lembaga yang diinisiasi oleh KPUD Kota Medan bertujuan memperkuat pelaksanaan program pendidikan politik. Kolaborasi ini akan memperdalam hubungan antar lembaga, memunculkan pandangan dan tindakan yang sejalan. Dalam konteks lembaga masyarakat, KPUD Kota Medan berupaya menciptakan agen/kader dari tokoh yang dipercayai masyarakat di tengah-tengah lembaga masyarakat yang ada. Dengan langkah ini, diharapkan penyebaran pemahaman tentang pendidikan politik antar masyarakat dapat ditingkatkan. Tujuannya adalah mempercepat dan meningkatkan partisipasi dalam proses pendidikan politik.

b. Pemanfaatan Media Dalam Sosialisasi Politik

Dalam penyelenggaraan pendidikan politik, pemilihan media menjadi hal yang sangat penting. Penggunaan media yang tepat dapat meningkatkan minat masyarakat dalam mengikuti pendidikan politik. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa minat dalam politik merupakan syarat dasar bagi warga negara yang bertanggung jawab dan demokratis, yang memiliki loyalitas kritis, keterampilan, dan kesiapan untuk terlibat dalam proses politik. Sebagai penyelenggara Pilkada, KPUD Kota Medan juga menggunakan media pendidikan politik untuk menysasar masyarakat. Dengan mayoritas penduduk Kota Medan terdiri dari Generasi Z dan Milenial, KPUD Kota Medan memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan media sosial dalam mendukung pelaksanaan pendidikan politik. KPUD Kota Medan menjalin kerjasama dengan berbagai platform media, termasuk televisi. Saluran TV lokal membantu dalam penyebaran informasi Pilkada, sementara saluran TV nasional iNews berpartisipasi dalam siaran langsung debat calon walikota pada 5 Desember 2020. Kolaborasi dengan saluran TV nasional mendapat respon positif, dengan lebih dari 100 ribu penonton di kanal Youtube iNews untuk debat calon Walikota Medan. KPUD Kota Medan aktif di berbagai akun media sosial resmi seperti situs web, Instagram, Twitter, Youtube, dan Facebook untuk mendukung pendidikan politik Pilkada. Penggunaan akun media sosial ini bertujuan untuk menyebarkan informasi tentang pemahaman politik dan tahapan Pilkada kepada masyarakat. Secara keseluruhan, KPUD Kota Medan telah memenuhi dimensi evaluasi process dengan baik. Mampu beradaptasi dengan kondisi pandemi, KPUD Kota Medan telah berhasil memanfaatkan berbagai media pendidikan politik, baik secara langsung maupun melalui media sosial, dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

➤ **Evaluasi Product**

Dimensi product merupakan penilaian akhir dari sebuah program, seperti program pendidikan politik KPUD pada Pilkada Kota Medan tahun 2020. Dimensi product dapat diukur dengan indikator berikut:

a. Ketercapaian Partisipasi Pemilih

Dari pelaksanaan pendidikan politik, hasilnya dapat dilihat dari partisipasi pemilih. Pemilihan pada 9 Desember 2020 menjadi momen penilaian program yang telah dilaksanakan. Evaluasi dari dimensi product dapat meliputi ketercapaian target partisipasi pemilih sebesar 77,5% yang ditetapkan oleh KPU Pusat serta peningkatan partisipasi pemilih dibandingkan dengan Pilkada Kota Medan tahun 2015. Dari data yang diperoleh, jumlah pengguna hak pilih pada Pilkada Kota Medan tahun 2020 sebanyak 1.614.615 suara, yang setara dengan 45,97% dari total pemilih. Dari 21 Kecamatan di Kota Medan, tidak ada yang mencapai target partisipasi pemilih. Data menunjukkan bahwa seluruh kecamatan masih di bawah target partisipasi yang ditetapkan oleh KPU Pusat. Rentang partisipasi pemilih di kecamatan-kecamatan tersebut berkisar antara 39%-54%. Meskipun tingkat partisipasi masyarakat masih di bawah target yang ditetapkan oleh KPU pusat, kenaikan partisipasi masyarakat di tengah kondisi pandemi perlu dievaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dalam situasi sulit, partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan meningkat. Ini mencerminkan pentingnya peran kepemimpinan dalam pandangan masyarakat. Kenaikan ini juga menunjukkan tercapainya salah satu tujuan pendidikan politik, yaitu peningkatan partisipasi pemilih dalam Pilkada.

b. Ketercapaian Kesadaran Politik Masyarakat

Dalam kriteria ini, evaluasi akan menilai sejauh mana masyarakat dapat mengetahui, memahami, bersikap, dan berperilaku terhadap aktivitas politik dalam konteks Pilkada. Seperti yang disampaikan oleh Wahyudin, pendidikan politik memiliki dampak signifikan terhadap kesadaran politik masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melihat apakah pelaksanaan pendidikan politik oleh KPUD Kota Medan mampu menciptakan kesadaran politik di kalangan masyarakatnya. Selain meningkatnya partisipasi pemilih, kesadaran politik masyarakat juga harus menjadi fokus bagi KPUD sebagai penyelenggara. Meskipun terjadi pelanggaran kesadaran politik oleh sebagian ASN dalam Pilkada 2020, namun tidak terjadi konflik di Kota Medan. KPUD telah memenuhi dimensi product sesuai teori Pendidikan politik (Affandi, 2011) dimana pendidikan politik dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan kesadaran politik masyarakat. Meskipun partisipasi pemilih meningkat dibandingkan Pilkada 2015, namun masih di bawah target KPU Pusat 77,5%. Pendidikan politik dari KPUD Kota Medan terbukti berhasil menciptakan kesadaran politik masyarakat, yang ditunjukkan dengan ketiadaan konflik pasca-Pilkada.

3.2 Upaya yang perlu dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam peningkatan pendidikan politik masyarakat di Kota Medan

KPUD Kota Medan sebagai penyelenggara pendidikan politik telah merumuskan beberapa strategi untuk mengatasi hambatan yang terjadi. Beberapa strategi tersebut antara lain: memaksimalkan

kemampuan personil yang memiliki kelebihan untuk menangani lebih dari satu pekerjaan dan tanggung jawab, bahkan di luar tugas pokoknya, membangun kerjasama dengan lembaga, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan untuk memberikan pendidikan politik secara berkelanjutan kepada masyarakat, dan mengoptimalkan ruang terbuka yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Medan sebagai tempat penyimpanan sementara aset Barang Milik Negara seperti Kotak dan Bilik Suara dan perlu dipertimbangkan upaya yang harus dilakukan oleh KPUD Kota Medan untuk persiapan pemilu berikutnya. Pendidikan politik merupakan aspek krusial dalam pemilu, karena selain meningkatkan partisipasi pemilih, juga memperbaiki kualitas demokrasi melalui peningkatan literasi politik masyarakat

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi program pendidikan politik dipengaruhi oleh berbagai variabel yang ada di lapangan. Sebagai contoh, pada Pilkada tahun 2020, penyelenggaraannya bertepatan dengan Pandemi Covid-19, yang menuntut adaptasi signifikan dalam pelaksanaan pendidikan politik. Dari aspek anggaran, terdapat pengalihan dana pendidikan menuju penegakan protokol kesehatan selama kegiatan Pilkada. Dari segi kegiatan, acara-acara gebyar yang biasa diadakan diubah oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Medan menjadi pendekatan yang lebih fokus pada penggerakan masyarakat dan mengurangi sifat seremonial untuk menghindari kerumunan. Selain itu, dalam Pilkada tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Medan memaksimalkan penggunaan media digital, termasuk platform media sosial dan konten yang digemari masyarakat seperti podcast dan talkshow. Strategi pelaksanaan program yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Medan bertujuan untuk menjangkau masyarakat seluas mungkin sambil tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 selama Pilkada.

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis mengungkapkan temuan bahwa semangat masyarakat dalam menyalurkan hak pilih tetap tinggi meskipun di tengah kondisi pandemi Covid-19. Hal ini terbukti dengan lonjakan angka partisipasi pemilih sebesar 20,59% dibandingkan dengan Pilkada Kota Medan tahun 2015.

IV. KESIMPULAN

Hasil evaluasi program pendidikan politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah pada Pilkada tahun 2020 di Kota Medan dengan pendekatan metode CIPP adalah: Dalam konteks (Context) pelaksanaan, pendidikan politik telah sesuai dengan PKPU Nomor 10 tahun 2018 dan PKPU Nomor 13 Tahun 2020, masukan (Input) pelaksanaan pendidikan politik, seperti Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran, dan Sarana Prasarana, telah dimanfaatkan sesuai dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun, terdapat keterbatasan dalam kapasitas input, seperti kekurangan sumber daya manusia, pengalihan anggaran pendidikan politik, dan sarana prasarana yang kurang memadai. Meskipun demikian, KPUD mampu menjalankan pendidikan politik pada Pilkada Kota Medan tahun 2020, proses (process): Hasil evaluasi menunjukkan bahwa KPUD Kota Medan berhasil menyesuaikan program pendidikan politik selama pandemi Covid-19, baik melalui media konvensional maupun digital dan hasil (product): Terjadi peningkatan partisipasi pemilih sebesar 20,59% dibandingkan Pilkada tahun 2015, meskipun masih di bawah target KPU Pusat sebesar 77,5%. Selain itu, pendidikan politik yang diselenggarakan oleh KPUD Kota Medan berhasil menciptakan kesadaran politik di masyarakat, yang terbukti dengan minimnya konflik sosial pasca-Pilkada.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini masih memiliki kekurangan utama, yaitu keterbatasan waktu yang tersedia, sehingga diperlukan studi lebih lanjut. Selain itu, dalam evaluasi program ini,

langkah kolaboratif lebih lanjut diperlukan agar penelitian ini dapat memberikan dampak yang lebih signifikan bagi masyarakat dan instansi terkait.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program kampung literasi di Penelitian ini memiliki visi untuk meningkatkan kualitas program pendidikan politik bagi masyarakat. Lebih jauh lagi, diharapkan masyarakat dapat memahami pelaksanaan program pendidikan politik dengan baik sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan memiliki kesadaran dalam kehidupan politik sehari-hari.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih khususnya disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Medan beserta seluruh strukturnya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjalankan penelitian ini, dan juga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan serta turut berperan dalam kesuksesan pelaksanaan penelitian ini.



VI. DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Idrus. 2011. Pendidikan Politik: Mengefektifkan Organisasi Pemuda Melaksanakan Pendidikan Politik Pancasila Dan UUD 1945. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Aris, R. K. (2019). Hakikat Penelitian. In Metode Penelitian Sosial (pp. 1– 18). Gawe Buku. Alfian. (1980). Politik Kebudayaan dan Manusia Indonesia. Jakarta : LP3ES.
- Anggara, S. (2015). Buku Sistem Politik Indonesia.pdf. In *Sistem Politik Indonesia* (pp. 22–24).
- Alfian. (1980). Politik Kebudayaan dan Manusia Indonesia. Jakarta : LP3ES.
- Anggara, S. (2015). Buku Sistem Politik Indonesia.pdf. In *Sistem Politik Indonesia* (pp. 22–24).
- Budiardjo, Miriam. 1998. Partisipasi Dan Partai Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Purnawati, Laily (2019). "Pendidikan Politik Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat."
- Nasuha, C.N . (2019). "Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Studi Pada Pilkada Bupati di Kabupaten Kuningan."
- Pattipeilohy, Adnan, Nurbani Yusuf, and Trisakti Handayani. 2018. "Analisis Dampak Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Sman 1 Balauring Lembata NTT." *Jurnal Civic Hukum* 3(2): 128.
- Powell, G. Bingham. 2000. *Elections as Instruments of Democracy: Majoritarian and Proportional Visions*. New Haven: Yale University Press.
- Kartono, Kartini. 1996. Pendidikan Politik. 2nd ed. Bandung: Mandar Maju
- Labolo, M., Ilham, T., Buku, D., Tinggi, P., Rajagrafindo, P. T., & Jakarta, P. (2015). PARTAI POLITIK DAN SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Teori, Konsep Dan Isu Strategis. [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf)
- Syarbaini, Syahrial, A. Rahman, and Monang Djihado. 2002. Sosiologi Dan Politik. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Shidiq, Umar, and Miftachul Choiri. 2019. Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan. 1st ed. ed. Anwar Mujahidin. Ponorogo: Nata Karya. [http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf).
- Hikmawatty, Sitti, and Bedjo Sujanto. 2020. "Evaluation of the Regional Election Commission Performance in Implementing the Socialization Program in Simultaneously General Election in Karawang Regional District." (Unicees 2018): 283–88.
- Wahyudi, Imam. 2018. "Peran Fungsionaris Badan Mahasiswa Pringsewu Seluruh Indonesia (BMP-

SI) Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat Di Kabupaten Pringsewu.” : 79.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, (2020).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

